

Analisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gotputuk Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Tahun 2021

Dinno Mukti Setyoaji, Dra. Rina Martini, M.Si

Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro Jl. Prof H Soedarto, S.H Tembalang Semarang
Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Abstract

Based on Law No. 32 of 2004 concerning the implementation of regional autonomy, now villages are considered to have an important role in development. In this case, the village community becomes the object of development, due to the condition of the village community living below the poverty line. To deal with these problems the community must be empowered. One of the government's efforts to support empowerment is by providing village funds. Due to the relatively large nominal of village funds, it is natural to get attention from the public about their use. This study aims to see and determine the use of village funds and the benefits of village funds for community empowerment. In this study the authors used qualitative research methods with a descriptive research design. The theory used in this research is the theory of community empowerment. This study uses the method of validating triangulation data and the data that has been collected will be analyzed. The results of the study show that the use of village funds for community empowerment in Gotputuk Village has been going well. It is proven by the selected empowerment program that brings benefits to the community, besides that this empowerment program also improves the welfare and standard of living of the community. The conclusions and suggestions from this research are that the implementation of the community empowerment program in Gotputuk Village in the utilization of village funds can be declared effective. It is hoped that the funds for the community empowerment program will be enlarged even more, because community empowerment can improve the welfare and independence of the community

Keywords: Village Fund Utilization, Community Empowerment

Abstrak

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pelaksanaan otonomi daerah, kini desa dianggap mempunyai peran penting dalam pembangunan. Dalam hal tersebut masyarakat desa menjadi objek dari pembangunan, dikarenakan keadaan masyarakat desa yang hidup dibawah garis kemiskinan. Untuk menangani masalah tersebut masyarakat harus diberdayakan. Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pemberdayaan yaitu dengan memberikan dana desa. Dikarenakan nominal dana desa yang relatif besar wajar apabila mendapatkan perhatian dari publik tentang penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui pemanfaatan dana desa dan manfaat dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemberdayaan masyarakat. penelitian ini menggunakan metode keabsahan data triangulasi dan data yang telah terkumpul akan dianalisis. Hasil dari penelitian menunjukkan pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Gotputuk sudah berjalan dengan baik. Dibuktikan dengan program pemberdayaan yang dipilih membawa manfaat untuk masyarakat, selain itu program pemberdayaan ini juga meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Simpulan dan saran dari penelitian ini yaitu pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Gotputuk dalam pemanfaatan dana desa sudah bisa dinyatakan efektif. Diharapkan dana untuk program pemberdayaan masyarakat lebih diperbesar lagi, dikarenakan pemberdayaan masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat

Kata Kunci: Pemanfaatan Dana Desa, Pemberdayaan masyarakat

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan yang berlaku saat ini, desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan, termasuk pembangunan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya nyata pemerintah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Tujuan dari kebijakan otonomi daerah yaitu memberi peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih di daerah, dengan kata lain pelaksanaan tugas pemerintah harus berdasar pada prinsip : efektif, efisien, akuntabel dan terbuka. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang desa, memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan aturan aturan yang telah ditetapkan dalam Undang Undang, yakni dijalankan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keikutsertaan masyarakat, keadilan, pemerataan, serta memperhatikan potensi suatu daerah.

Berangkat pada aturan tersebut, kini desa dianggap sebagai sektor penting dari pembangunan. Dimana rencana dan realisasi pembangunan harus bersumber pada aspirasi masyarakat. Dalam hal tersebut masyarakat desa yang menjadi objek dalam pembangunan dan pemberdayaan, dengan tujuan dapat memberi semangat bagi masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan, untuk menjadi desa yang unggul dan mandiri.

Hal tersebut didorong oleh keadaan bahwa sebagian masyarakat desa hidup dibawah garis kemiskinan, sehingga dibutuhkan penanganan untuk merubah keadaan tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat hidup dalam kemiskinan yang berdampak pada berbagai masalah, diantaranya ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi tersebut semakin parah karena pemerintah belum menemukan solusi untuk mengurangi ancaman kemiskinan. Oleh karena itu masyarakat tersebut perlu diberdayakan untuk lebih mandiri agar bisa merubah kehidupan mereka. Bentuk pemberdayaan masyarakat desa yang paling cepat dalam mencapai tujuan adalah dengan partisipasi masyarakat, atau dengan

kata lain melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang mempunyai kebijakan untuk memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa agar mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki di desa tersebut.

Salah satu program dari pemerintah untuk mendukung pembangunan desa yaitu dengan memberikan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 menyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari APBN.

Dana Desa adalah bentuk nyata pengakuan negara terhadap hak desa dan kewenangan lokal. Besaran Dana Desa yang dialokasikan per desa bervariasi sesuai dengan alokasi formula. Rumus alokasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan menghitung jumlah penduduk desa, luas desa dan tingkat kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis. Data jumlah desa, luas desa, tingkat kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari kementerian atau lembaga terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor ketersediaan layanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

Tahun 2018 setiap desa rata rata mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 800,4 juta, tahun 2019 sebesar Rp. 933,9 juta, tahun 2020 sebesar Rp. 960,6 juta. Sedangkan tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 72 triliun untuk 75.961 desa di Indonesia. Sampai Juli 2021 sebesar Rp. 28,82 triliun atau 40,02 persen dana desa sudah digulirkan ke 69.661 desa. (Sumber: Kementerian keuangan)

Dikarenakan nominal dana desa yang relatif besar dan begitu penting serta strategisnya dana desa, wajar jika mendapat perhatian lebih dari publik. Terlebih lagi banyak pihak yang khawatir terhadap kapabilitas perangkat desa dalam mengelola dana tersebut.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga mengeluarkan Permendes Nomor 21 Tahun 2016 tentang prioritas dana desa untuk membiayai pelaksanaan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dimaksudkan agar dana desa dapat tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh aparat desa atau pihak

lain.

Dalam merancang penelitian “Analisis pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Gotputuk Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora” penulis melakukan peninjauan terhadap penelitian sebelumnya. Dengan penelitian terdahulu diharapkan penulis dapat melihat persamaan dan perbedaan dalam melakukan penelitian, selain itu dalam penelitian ini diharapkan bisa diperlihatkan tentang kekurangan dan kelebihan dari penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Nunik Riyani (2016) dengan judul penelitian Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Singopuran Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo) tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan dana desa dan evaluasi dari penggunaan dana desa di Desa Singopuran tahun 2016. Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan poin yaitu, Dana desa digunakan untuk pembangunan masyarakat seperti perbaikan jalan, pembuatan talut, pembelian ATK, program PKK. Sedangkan kendala yang menghambat dalam penggunaan dana desa di Desa Singopuran adalah perangkat desa yang belum maksimal dalam mempertanggung jawabkan penggunaan dana desa.

Selain penelitian yang dilakukan oleh Nunik Riyani, peneliti juga melakukan peninjauan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Kristina Korniti (2017) dengan judul penelitian “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru kota Kabupaten Kutai Timur” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat serta faktor penghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa. penelitian yang dilakukan menghasilkan poin yaitu, pengalokasian dana desa telah terlaksana dan digunakan untuk masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu pengelolaan dana desa kurang optimal karena dipengaruhi oleh sumber daya masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan mengambil judul “ Analisis Pemanfaatan Dana

Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gotputuk Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Tahun 2021”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu: Bagaimanakah pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Gotputuk Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : Untuk mengetahui pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Gotputuk Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora pada tahun 2021

B. Landasan Teori

Desa

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2004 yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Haw Widjaja (2003:3) desa merupakan satu kesatuan dari masyarakat yang mempunyai susunan asli karena hak asal usul yang istimewa.

Seiring berjalannya ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Berikut adalah pengertian Desa menurut para ahli

a. Menurut R. Bintarto desa adalah kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dan adanya hubungan timbal balik dengan daerah lain

b. Menurut R.H. Unang Soenardjo, desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki hukum dan adat dan menetap dalam suatu wilayah tertentu memiliki ikatan lahir dan

batin yang sangat kuat, karena keturunan ataupun karena memiliki kepentingan bersama.

Karakteristik Desa

Wilayah pedesaan pada umumnya masih gambarkan sebagai daerah yang berada di wilayah pedalaman, jauh dari lingkungan perkotaan dan memiliki keterkaitan yang kuat terhadap kehidupan tradisional. Dalam masyarakat desa berlaku keteraturan kehidupan sosial yang mencakup kegiatan-kegiatan ekonomi, keagamaan, politik, dan hukum yang sesuai dengan lingkungan hidup setempat.

Karakteristik wilayah pedesaan lebih bersifat alami, belum banyak yang tersentuh oleh teknologi modern dan perkembangan pembangunan. Selain sebagai lahan pemukiman penduduk, sebagian wilayah desa terdiri atas lahan pertanian, perkebunan atau tertutup oleh sebagian hutan alami. Kehidupan masyarakat pedesaan dicirikan oleh kegiatan yang pada umumnya bercorak agraris. Aktivitas kesehariannya masih didominasi oleh pengaruh lingkungan alam. Dengan kata lain, pengaruh lingkungan atau kondisi alam setempat masih sangat kuat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat desa.

Karakteristik sosial masyarakat desa menurut Soejono Soekanto antara lain Warga desa memiliki hubungan kekerabatan yang kuat karena umumnya berasal dari satu keturunan, yaitu diikat oleh sistem kekeluargaan yang kuat, sebagian besar penduduk bekerja pada sektor agraris (pertanian, perkebunan, peternakan, maupun perikanan), cara bertani masih relatif sederhana atau tradisional sehingga sebagian besar hasilnya masih diperuntukkan bagi kebutuhan hidup sehari-hari sifat gotong royong masih cukup tampak dalam kehidupan sehari-hari penduduk desa, golongan tertua dikampung atau ketua adat masih memegang peranan penting dan memiliki kharisma besar dimasyarakat sehingga dalam musyawarah atau proses pengambilan keputusan orang-orang tersebut sering kali diminta saran atau petunjuk, Pada umumnya sebagian masyarakat masih memegang norma-norma agama yang

cukup kuat. Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi tentu saja saat ini banyak desa yang telah mengalami perubahan. Interaksi dengan wilayah kota pun mulai tampak terjalin dan penduduk desa menyadari bahwa interaksi dengan perkotaan itu sangat penting.

Ciri-ciri Desa

Adapun ciri-ciri desa secara umum adalah :

- a. Pembangunan di desa relatif lambat.
- b. Hampir semua masyarakat desa hidup dari usaha pertanian. Walaupun sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, Namun sebenarnya mata pencaharian masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh faktor alam yang ada. Berdasarkan mata pencahariannya, desa dapat dibedakan menjadi : desa nelayan, desa agraris, desa perkebunan, desa peternakan, desa industri dan sebagainya.
- c. Corak kehidupan di desa berdasarkan pada ikatan kekeluargaan yang erat yang memiliki unsur gotong royong yang kuat.
- d. Orientasi pembangunan di desa lebih diwarnai oleh adat, tradisi, dan kekeluargaan.
- e. Perekonomian desa sangat dipengaruhi oleh musim, bencana hama, penyakit, kekeringan, dan juga lainnya.
- f. Di pedesaan, adat dan tradisi masih berbentuk dan berkembang secara turun-temurun.

Kewenangan Desa

Untuk mendukung kemandirian desa maka desa perlu diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun menurut RUU Pemerintah, kewenangan desa meliputi: Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa yang diakui kabupaten atau kota. Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten atau kota yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada desa sebagai lembaga dan kepada kepala desa sebagai penyelenggara pemerintah desa juga dibantu oleh BPD dan perangkat desa. Adapun perangkat desa lainnya terdiri dari: Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan, Unsur Kewilayahan.

Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal

dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya atau kekuatan maupun kemampuan, dan atau proses pemberian daya atau kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Kata proses menunjukkan pada tindakan atau langkah yang dilakukan secara sistematis yang mencerminkan langkah untuk mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah menuju kondisi memiliki kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan.

Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka (Suparjan dan Hempri, 2013).

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek. Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (power) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya obyek menjadi subyek (Suparjan dan Hempri, 2013).

Menurut Huraerah 2008, pemberdayaan masyarakat merupakan proses usaha memperkuat yang disebut kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, menemukan solusi, serta memperhatikan kemampuan yang dimiliki. Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi

masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya. Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonom pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Pada aras ini pemberdayaan masyarakat juga difokuskan pada penguatan individu anggota masyarakat beserta pranata-pranatanya.

Tujuan Pemberdayaan

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. selanjutnya perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik- material.

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu,

dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal (Ambar Teguh, 2004).

Berikut adalah tahapan proses pemberdayaan Masyarakat :

1. Proses perencanaan

Perencanaan adalah tahapan awal dari suatu kegiatan yang akan dijalankan atau dilaksanakan. Perencanaan merupakan tahapan yang penting, dikarenakan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan bergantung dari perencanaan yang dilakukan. Perencanaan harus dilakukan secara matang agar kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik (Sudarto:2014)

Tahapan awal dari proses pemberdayaan yaitu melakukan rembuk dengan warga untuk menentukan program yang akan dijalankan. Pada tahapan ini pemerintah desa melakukan rembuk dengan warga di tingkat RT/RW guna membahas permasalahan yang ada di skala RT/RW tersebut. Kemudian masalah di skala RT/RW tersebut dibawa oleh perwakilan RT/RW untuk dibawa ke musrenbangdes.

2. Proses pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan langkah untuk mengtur kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan (Harini : 2013).

Pengorganisasian penting agar pelaksanaan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan, selain itu agar tujuan yang dicapai bisa lebih efektif dan efisien. Pengorganisasian tersebut membutuhkan kordinasi yang sinergis antar setiap partisipan didalamnya.

3. Proses pengarahan

Pengarahan merupakan upaya untuk menggerakkan elemen yang terlibat demi tercapainya tujuan yang efektif dan efisien (Harini : 2013). Pengarahan tersebut erat kaitannya dengan kepemimpinan, yaitu pemimpin mengarahkan bawahannya untuk melakukan apa yang di maksudkan untuk tercapainya suatu tujuan

4. Proses pengawasan

Proses pengawasan merupakan bagian dari

manajemen untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sebagaimana tujuan awal (Kencana syafie : 2010).

Indikator pemberdayaan masyarakat

Untuk mengetahui pencapaian daripada tujuan pemberdayaan maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan masyarakat berdaya atau tidak. Melalui cara ini kita bisa melihat program pemberdayaan yang diberikan dan dapat difokuskan pada aspek apa saja dari perubahannya.

Keberhasilan pemberdayaan dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Menurut Suharto : 2005 indikator yang dapat dikaitkan dalam proses keberhasilan pemberdayaan yaitu:

1. Keberhasilan mobilitas, yaitu kemampuan individu untuk pergi keluar rumah . seperti ke pasar, fasilitas kesehatan, sekolah, dll
2. Kemampuan membeli komoditas kecil, yaitu kemampuan individu untuk membeli barang kebutuhan sehari hari, seperti: beras, minyak goreng, bumbu dapur, sabun, shampo, dll
3. Kemampuan membeli komoditas besar, yaitu kemampuan individu untuk membeli bahan pendamping atau tersier, seperti: TV, pakaian, perabotan rumah tangga, dll
4. Jaminan ekonomi dan kontribusi keluarga, seseorang dianggap berdaya jika memiliki rumah, aset, tabungan dan itu milik sendiri, bukan milik keluarga.

Aspek Aspek Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Soemodiningrat 2002, upaya memberdayakan masyarakat bisa dilihat dari tiga aspek, yaitu:

1. Enabling, yaitu menciptakan situasi dimana untuk memungkinkan masyarakat bisa berkembang. Disini poinnya adalah pengenalan bahwa pada dasarnya setiap manusia bisa dikembangkan.
2. Empowering, yaitu memperkuat potensi seseorang untuk berdaya. Untuk mengaktualisasikan langkah ini diperlukan langkah positif dan nyata.
3. Opportunities, yaitu pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang akan membuat individu menjadi berdaya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah dan juga masyarakat yang ikut berpartisipasi. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Aceh Tengah. Pemilihan lokasi penelitian ini karena di Kabupaten tersebut terdapat Pelemahan *Sarak Opat*.

Peggalian data atau pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif agar mendapatkan data yang diperlukan. Ada beberapa metode yang digunakan dalam metode penelitian ini, yaitu; Observasi; wawancara; dokumentasi; dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan adalah Analisis Pemanfaatan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gotputuk. Analisis pemanfaatan dana desa ini dilaksanakan guna melihat dan mengetahui bagaimana pemanfaatan Dana Desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Gotputuk. Perubahan paradigma pembangunan fisik ke pembangunan yang bersifat memberdayakan masyarakat memaksa pengelolaan keuangan juga diarahkan ke pemberdayaan, yang mana mempunyai tujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat untuk lebih bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu pemanfaatan dana desa seharusnya difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat untuk melatih kemandirian guna memperbaiki kesejahterannya.

Pada tahun 2021 Desa Gotputuk mendapatkan Dana Desa Sebesar Rp. 807.207.000. Perolehan dana desa yang tinggi di Desa Gotputuk harusnya bisa di manfaatkan dan dikelola dengan baik oleh pemerintah desa agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Bentuk upaya yang bisa dilakukan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan cara memberdayakan potensi yang dimiliki

masyarakat untuk kembangkan sehingga masyarakat bisa mandiri dan meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya juga.

Pemberdayaan tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada keikutsertaan masyarakat dalam setiap tahapannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Tujuan daripada keterlibatan masyarakat dalam hal ini yaitu agar masyarakat tahu apa yang mereka butuhkan dan apa yang harus mereka lakukan untuk meningkatkan kesejahterannya. Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil daripada penelitian tentang analisis pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Gotputuk yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Penulis terpusat pada pembahasan untuk dana desa sebesar Rp 807.207.000.

Hasil Pemanfaatan Dana Desa di Desa Gotputuk Penelitian ini lebih menitikberatkan kepada hasil atau output dari kegiatan pemberdayaan yang ada di Desa Gotputuk, mengingat besarnya dana desa yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan di desa. Pemerintah desa diberi otoritas untuk mengelola dana desa sesuai prioritas yang dibutuhkan masyarakat. Adapun prioritas pemerintah desa yang dimaksud ialah kesejahteraan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Sebagai bentuk konkret dari pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa memberikan bantuan berupa dana desa untuk kemudian dijadikan sebagai langkah awal realisasi peningkatan kesejahteraan.

Pemberian kambing sebagai objek budidaya untuk pemberdayaan masyarakat setempat disesuaikan dengan potensi masyarakat dan potensi lingkungan yang mendukung. Budidaya kambing membutuhkan pakan ternak yang bisa didapatkan dengan mudah dengan memanfaatkan limbah pertanian yang ada. Selain itu, limbah hasil peternakan juga dapat dimanfaatkan untuk pupuk. Oleh karena itu, harapannya masyarakat setempat dapat memanfaatkan potensi yang ada untuk dapat mandiri secara ekonomi.

Peternakan Kambing

Program ternak kambing adalah salah satu program pemberdayaan masyarakat di Desa Gotputuk yang telah dijalankan dengan sumber

dana yang berasal dari dana desa. Program ternak kambing sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat tersebut dimulai pada bulan Juni 2021. Kegiatan ternak kambing ini diberikan kepada kelompok keluarga kurang mampu, dengan mekanisme budidaya. Sesuai hasil survei, diketahui bahwa saat ini terdapat satu kelompok masyarakat yang tergabung untuk membudidayakan kambing. Dimana pemerintah Desa Gotputuk memberikan uang sebesar Rp. 21.937.000 yang berasal dari dana desa, untuk dibelikan kambing oleh kelompok anggota ternak guna melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Satu kelompok terdiri dari 15 anggota masyarakat dari keluarga kurang mampu. Adapun jumlah total kambing yang ada saat ini sebanyak 17 ekor. Penggunaan dana desa sebesar Rp 21.937.000 tidak hanya dialokasikan untuk pembelian kambing saja, namun juga digunakan untuk sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan tersebut, seperti pembuatan kandang, alat bahan pendukung kegiatan dsb.

Mekanisme pengelolaan ternak tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan prinsip pembagian hasil yang merata antar anggota kelompok. Anggota kelompok diberikan otoritas atau kebebasan untuk mengatur program budidaya ternak kambing secara bertanggungjawab. Bentuk tanggungjawab yang harus dilakukan oleh anggota adalah adanya catatan pembukuan yang jelas untuk setiap kegiatan yang dilakukan. Salah satu bentuk konkret dari pembukuan tersebut adalah adanya pengeluaran dan pendapatan. Pengeluaran tersebut berupa pembelian sarana dan prasarana yang mendukung serta biaya perawatannya. Adapun pendapatannya diperoleh dari penjualan kambing ternak. Untuk pakan dalam program ternak tersebut tidak mengeluarkan biaya dikarenakan anggota kelompok ternak mencari sendiri rumput yang akan dijadikan pakan kambing, selain itu mereka memanfaatkan lahannya untuk ditanami rumput gajah sebagai persediaan pakan kambing. Sedangkan campuran pakan seperti dedak atau bekatul juga tidak beli karena kelompok anggota ternak memanfaatkan ampas dari penggilingan padi saat mereka menggilingkan padinya. Berdasarkan kesepakatan saat musyawarah, jenis kambing yang dipilih untuk di ternak atau

dibudidayakan adalah kambing jantan, dengan tujuan untuk pembesaran dan siap dijual setelah jangka waktu 3 bulan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Gotputuk dalam pemanfaatan dana desa sudah bisa dinyatakan efektif. Hal tersebut bisa buktikan dengan tepatnya pemilihan program untuk dijadikan sebagai pemberdayaan masyarakat. Masyarakat sangat senang dan antusias dengan program pemberdayaan tersebut, dikarenakan mayoritas masyarakat Desa Gotputuk selain terbiasa bertani mereka juga terbiasa dalam mengembangkan ternak, jadi bukan hal yang sulit bagi masyarakat untuk menjalankan program pemberdayaan tersebut. Faktor geografis yang mendukung juga mempengaruhi keberhasilan program ternak tersebut. Kondisi geografis desa yang masih asri dan subur mempermudah kelompok ternak untuk mendapatkan rumput sebagai bahan pakan untuk ternak kambingnya. Selain itu mayoritas penduduk desa yang berprofesi sebagai petani sehingga dapat dengan mudah untuk mendapatkan dedak atau bekatul sebagai campuran atau tambahan pakan untuk ternak kambingnya. Mereka mendapatkan dedak atau bekatul dari sisa atau ampas penggilingan padi. Sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan uang untuk biaya pakan ternak kambingnya, dimana hal ini berpengaruh terhadap lebih banyaknya keuntungan yang mereka dapat dan berpengaruh terhadap pendapatan yang akan meningkatkan kesejahteraan hidup anggota kelompok ternak. Sedangkan dari segi manfaatnya, pelaksanaan program tersebut sudah bisa dibilang membawa manfaat positif bagi masyarakat, dengan melihat hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti selama penelitian. Masyarakat merasa bersyukur atas program pemberdayaan yang membawa manfaat bagi kehidupan mereka. Dengan adanya program tersebut masyarakat mempunyai penghasilan sampingan selain penghasilan dari sektor pertanian. Dari pendapatan sampingan tersebut menjadikan kesejahteraan mereka berkembang.

B. Saran

Dari simpulan tersebut maka penulis dapat memberikan saran yang diharapkan bisa menjadi

masukannya untuk Desa Gotputuk. Pemanfaatan dana desa di Desa Gotputuk sebagian besar masih difokuskan pada pembangunan fisik, sedangkan pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat masih kecil. Diharapkan dana untuk program pemberdayaan masyarakat lebih diperbesar lagi, dikarenakan pemberdayaan masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Harapannya kedepannya dapat bermunculan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang disesuaikan dengan teknologi mendatang dengan melibatkan peran para warga desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi komunitas*, Edisi Revisi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI
- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas: Pengembangan Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media
- Bintarto, R. 1983. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif Edisi kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dini, Gemala Sari. 2010. *Hubungan Alokasi Dana Desa Dengan Pembangunan Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat*. Tesis. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.
- Fathoni, Abdurahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Hikmat, Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama
- Huraerah, Abu. 2011. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Edisi Kedua. Bandung: Humanior.
- Kusumaputra, Chandra. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Studi di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang*. *Jurnal Administrasi Publik*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Sinaga, Murbanto. 2016. *Keuangan Daerah*. Medan: USU press.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Cetakan Pertama. Bandung: PT Refika Aditama
- Suparjan & Hempri Suyatno. (2003). *Pengembangan Masyarakat dari pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media

- Tjahja, S, 2000. Konsep Pembangunan Yang Melakukan Pendekatan Kemanusiaan. Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Widjaja, HAW. 2003. Otonomi desa Merupakan otonomi Asli Bulat dan Utuh. Jakarta: Pt. Raja Grafindo persada.
- Widiyanto, Agus. 2011. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Optimalisasi Peningkatan dan Pemanfaatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Studi Eksplorasi de Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabuapten Boyolali. Skripsi S-1. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wulanompi, Atika. 2013. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Studi di Desa Pangu Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Ilmu Pemerintahan, FISIP UNSRAT